

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TA 2025

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	RENCANA AKSI (Kegiatan yang selama ini menjadi permasalahan krusial dalam rangka pencapaian target output dan sebagai upaya kualitas output sehingga berdampak bagi peningkatan kinerja organisasi)	TIMELINE RENAKSI (TRIWULAN I/II/III/IV)
A. BAGIAN UMUM DAN TU							
1.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	Rp 27.385.751.000	1. Penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran 2. Pengelolaan Urusan Keuangan dan BMN 3. Pengelolaan Pengembangan Kompetensi SDM 4. Pelaksanaan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokoleran dan Pelayanan Pengaduan	1. Melakukan penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat TA 2025 - 2029 2. Melakukan penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi TA 2026 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat 3. Menyusun Kebutuhan Angka Dasar Pagu TA 2027 1. Melaksanakan pra rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN TA 2024 tingkat Satuan Kerja 2. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN TA 2024 tingkat Kantor Wilayah 3. Menyusun Laporan Keuangan TA 2024 Audited 4. Merekapitulasi kebutuhan gaji, tunjangan kinerja pegawai dan uang makan 5. Melaksanakan pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan sesuai aturan yang berlaku 6. Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I 2025 tingkat Kantor Wilayah 7. Menyusun Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 8. Menyusun Laporan Keuangan triwulan III Tahun 2025 9. Memaksimalkan penyerapan anggaran dan capaian nilai IKPA 10. Mengelola BMN dengan Surat Perjanjian Penggunaan Bersama dan sementara BMN dalam Rangka Transisi Kementerian 11. Mengajukan permohonan alih status penggunaan BMN dari kode Satker 013 ke kode Satker 135 12. Revisi RKBMN tahun 2025 13. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN semester I 14. Penyusunan RKBMN TA 2027 15. Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN semester II 16. Koordinasi Pengelolaan BMN 17. Pengamanan BMN 18. Penatausahaan BMN 19. Penyusunan Laporan BMN 20. Pengalihan dan Monitoring BMN Impementasi Corporate University dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat 1. Melaksanakan pengelolaan pengaduan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala 3. Menyusun rencana kerja sama TA. 2025 4. Melaksanakan administrasi kerja sama 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama 6. Melakukan pendataan kerjasama
							Triwulan I Triwulan I - IV Triwulan IV Triwulan I Triwulan I Triwulan I Triwulan I - IV Triwulan I - IV Triwulan II Triwulan II Triwulan III Triwulan I - IV Triwulan I - II Triwulan III - IV Triwulan I Triwulan II Triwulan IV Triwulan IV Triwulan I - IV Triwulan I - IV Triwulan I - IV Triwulan II - IV Triwulan I - IV Triwulan I - IV

						7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keprotokoleran	Triwulan I - IV
						8. Melakukan publikasi/glorifikasi Informasi Kegiatan	Triwulan I - IV
					5. Penyusunan Penataan Organisasi dan Tata Laksana, Administrasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi	1. Melaksanakan penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Ingeritas Pembangunan ZI Tahun 2025	Triwulan I
						2. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM	Triwulan I
						3. Penetapan Rencana Kerja dan Target Prioritas Pembangunan ZI	Triwulan I
						4. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI	Triwulan I - IV
						5. Pelatihan Budaya Kerja (workshop, in House Training)	Triwulan I - IV
						6. Penguatan Pembangunan Zona Integriras	Triwulan I - IV
						7. Pelaksanaan Desk Evaluasi	Triwulan II
						8. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Pembangunan ZI dan Upload Data Dukung	Triwulan I - IV
						9. Pelaksanaan Road map Rencana Kerja Tahunan RB dan Upload Data Dukung	Triwulan I - IV
						10. Monitoring dan Evaluasi RKT RB	Triwulan I - IV
					6. Pelaksanaan Teknologi Informasi dan Pengolahan Data	1. Melaksanakan pengelolaan aplikasi (perbaikan, pembuatan, dan pembaharuan) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat	Triwulan I - IV
						2. Penyusunan Dokumen Data Dukung Tindak Lanjut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Triwulan I - IV
						3. Melaksanakan pengelolaan jaringan dan internet	Triwulan I - IV
					7. Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan	1. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat periode Semester I TA 2025	Triwulan II
						2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat periode TA 2025	Triwulan IV
						3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap CRO seluruh DIPA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat	Triwulan I - IV
						4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi SPIP, Manajemen Risiko dan SAKIP Kantor Wilayah	Triwulan I - IV
					8. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga	1. Pengelolaan arsip Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat	Triwulan I - IV
						2. Pemeliharaan fasilitas perkantoran.	Triwulan I - IV
						3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga	Triwulan I - IV

B. DIVISI PEMBENTUKAN REGULASI										
1.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	Rp 434.335.000	1. Persiapan Harmonisasi	Melaksanakan Persiapan Harmonisasi	Triwulan I-IV		
						2. Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah	A. Melaksanakan Koordinasi Dengan Instansi Terkait di Daerah B. Pelaksanaan Harmonisasi	Triwulan I		
						3. Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah	A. memetakan Peraturan Daerah/Rancangan Produk Hukum Daerah	Triwulan III-IV		
							B. melaksanakan Mediasi dan Konsultasi Peraturan Daerah	Triwulan I-IV		
							C. merencanakan Kegiatan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah	Triwulan I dan Triwulan III		
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-Undangan	24 orang	Rp 218.655.000	1. Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Melaksanakan Persiapan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Triwulan I dan Triwulan III		
						2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Triwulan II dan Triwulan III		
						3. Pelaporan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Melaporkan Hasil Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Triwulan IV		
2.	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1) Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	Rp 54.366.000	1. Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum	Melaksanakan Persiapan Analisis dan Evaluasi Hukum	Triwulan I-IV		
						2. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi	Melaksanakan Analisis dan Evaluasi Hukum	Triwulan III		
						3. Perumusan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Merumuskan Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum	Triwulan IV		
						4. Peningkatan Pemahaman Analisis	Meningkatkan Pemahaman Analisis dan Evaluasi	Triwulan III		
			2) Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	Rp 89.693.000	1. Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Memfasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Triwulan III-IV		
						2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembentukan	A. Melakukan Inventarisasi dan Movev Propemperda B. Memberikan Rekomendasi Analisa Kebutuhan Ranperda	Triwulan III-IV Triwulan IV		
		Pembinaan dan Pengembangan JDIIH di Wilayah				1. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan JDIIH di wilayah	Triwulan II			
						2. melaksanakan monitoring pengelolaan JDIIH di wilayah	Triwulan I			
		3.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIIHN di	Persentase Anggota JDIIHN yang Dikelola	25%	Rp. 120.526.000			
				Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1) Persentase Layanan Bantuan Hukum Utigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	Rp. 4.152.000.000	Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Kontrak Bantuan Hukum	Melaksanakan rapat koordinasi dan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara Kantor Wilayah dengan PBH	Triwulan III/IV
Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum Litigasi	addendum perjanjian pelaksanaan bantuan hukum antara permohonan pelaksanaan dan							Triwulan I s.d IV		
								Triwulan I s.d IV		
								Triwulan I s.d IV		
2) Persentase Layanan Bantuan Hukum	80%				Rp. 810.920.000	Verifikasi Permohonan Bantuan Hukum Non-Litigasi	permohonan pelaksanaan dan	Triwulan I s.d IV		
								Triwulan I s.d IV		
Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan			70%	Rp. 63.301.000	1. Layanan penyuluhan hukum di	1. Penyuluhan Hukum Langsung dan Tidak Langsung,	Triwulan I s.d IV		
						2. Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok KADARKUM	Triwulan I		
							2. Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan Menuju	Triwulan II		
			3. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum			Triwulan III				
			3. Pemantauan dan Evaluasi	4. Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Triwulan IV					

4.	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	Rp 29.738.000	Kesekretariatan Indeks Reformasi Hukum di Wilayah	Reformasi Hukum Tahun 2025 (Prop/Kab/Kota) 2. Laporan Hukum pada Pemda (Prop/Kab/Kota) Hukum di Wilayah	
C. DIVISI PELAYANAN HUKUM								
1.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Meningkatnya PNPB Ditjen Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	6% 90%	5.154.300.000	Penyebaran informasi Layanan AHU Pengawasan lapangan terhadap hasil Pengkinian Data Notaris dan Pelaksanaan Audit Kepatuhan Penerapan PMPJ Onsite	pendaftaran, perubahan penghapusan Jamnan Fidusia Laporan hasil pengawasan lapangan terhadap hasil Pengkinian Data Notaris dan pelaksanaan Audit Kepatuhan Penerapan PMPJ Onsite	Maret, Mei, Juli April, Juni, September
2.	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian AduanPelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Rp47.100.000	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1. Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran HKI	Triwulan I
					Rp160.712.000	Pemantauan potensi Pelanggaran HKI di Wilayah	1. Pengawasan HKI di wilayah 2. Pendampingan penanganan aduan/pelanggaran KI di Wilayah 3. Evaluasi dan Pelaporan Penegakan Hukum KI di wilayah	Triwulan I - IV Triwulan I, III dan IV Triwulan I - IV
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1) Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	Rp1.034.713.000	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1. Diseminasi dan edukasi kekayaan intelektual di wilayah	Triwulan I - IV
			2) Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	Rp483.168.000	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1. Fasilitasi pendampingan layanan kekayaan intelektual di	Triwulan I - IV
					Rp759.500.000	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	1. Penyebaran Informasi kekayaan intelektual	Triwulan I - IV